

Pendekatan Kelembagaan

by Adrie F. Assa

Submission date: 02-Dec-2022 03:43PM (UTC+0700)

Submission ID: 1969101552

File name: Pendekatan_Kelembagaan_compressed.pdf (267.3K)

Word count: 3417

Character count: 21960



1 PENDEKATAN KELEMBAGAAN DALAM PENGEMBANGAN MODEL PEREKONOMIAN HIJAU

1 Bambang Siswanto dan Adrie Frans Assa
Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Krida Wacana

Abstract: *The development and application of green economy in many countries, including Indonesia, can be said still at the normative level. The United Nations Environment Program (UNEP) has provided guidelines for implementation of the green economy concept. The concept seems to be difficult to be implemented since many economics run in accordance with the neo-classical thought. It can be implemented, however, as far as institutional aspect the economics is taken in to consideration, and the positive thought is replaced with normative one. The objective of this research is to formulate a green economic model that may be implemented in Indonesia based on institutional economic framework. Two main variables used in the model are rules of game and organizations as players. The research approaches are those systematically review on the existing regulations, Experts Consultations, and analysis reports of state enterprises' best practices*

Keywords: Green Economy Global, Institutional Economics

PENDAHULUAN

Ekonomi hijau atau perekonomian hijau (*green economy*) merupakan jargon yang akhir-akhir banyak dibicarakan, bahkan dijadikan tema peringatan hari lingkungan hidup sedunia oleh UNEP (United Nations Environment Programme). Gerakan ekonomi hijau sudah mulai dilakukan di berbagai negara, meskipun masih relatif sedikit diimplementasikan, seperti ditunjukkan pada situs UNEP (United Nations Environment Programme). Ekonomi hijau juga menjadi salah satu fokus pembicaraan di RIO+20, konferensi PBB tentang pembangunan berkelanjutan. Konsep ekonomi hijau yang diluncurkan UNEP sepertinya dibebani tugas untuk menghapus mitos yang selama ini berkembang, yakni *trade-off* antara ekonomi dan lingkungan hidup.

Mengapa harus ekonomi hijau? Defra menyatakan transisi ke ekonomi hijau merupakan elemen penting tercapainya pembangunan berkelanjutan dan pertumbuhan jangka panjang. Fauzi (2012) menyatakan model ekonomi yang diacu selama ini menyebabkan tujuan menyejahterakan manusia harus dibayar dengan mahalnya ongkos sosial dan lingkungan. Cato (2009) menyatakan ekonomi hijau diperlukan karena sistem ekonomi yang dianut selama ini sarat dengan ketidakadilan dan ketimpangan, seperti dapat dilihat dari indikator *inequalities*. Barat lebih banyak mengkonsumsi dan menguasai sumber daya alam dibandingkan Selatan, dominasi perekonomian oleh laki-laki, merupakan beberapa contoh *inequalities* yang dimaksudkan.

Meskipun tampaknya ekonomi hijau sudah menjadi arus utama pemikiran ekonomi, sejauh ini perkembangan ekonomi hijau (*green economy*) di berbagai negara – termasuk Indonesia – masih dalam tataran normatif, atau paling tidak belum memiliki proporsi signifikan pada sistem perekonomian nasional. Sampai tahun 2010, UNEP masih pada tahapan memproduksi inisiatif perekonomian hijau dan memberikan petunjuk (nasehat) yang membumi untuk mempraktekkan perekonomian hijau bagi beberapa negara.

Konsep ekonomi hijau belum sepenuhnya menjadi rujukan ekonom-ekonom arus utama, meskipun tampaknya sudah terjadi pengarusutamaan konsep ekonomi hijau. Jurnal-jurnal ilmu ekonomi yang ternama masih sangat sedikit memuat artikel tentang ekonomi hijau. Implementasi perekonomian hijau sulit dilakukan jika cara pandang ekonomi positif masih didasarkan pada asumsi mazhab neoklasik.

Saat ini, sepertinya ekonomi hijau masih merupakan gerakan moral dan relatif masih bersifat normatif. Untuk mengimplementasikan ekonomi hijau masih dibutuhkan seperangkat aturan main, peran figur dan institusi, dan bahkan sosialisasi. Pada situasi seperti ini, pendekatan mazhab ekonomi kelembagaan dapat menjadi solusi untuk perpindahan dari tataran normatif menjadi ekonomi positif.

Tujuan kajian ini adalah membangun model perekonomian hijau yang bisa diimplementasikan di Indonesia berdasarkan kerangka analisis kelembagaan. Jaya (2012) membuat model peran kelembagaan dalam pengembangan ekonomi lokal dengan pendekatan *rule of the game* dan *organization (players)*.



Mengacu pada model yang dibangun Jaya (2012), variabel kelembagaan yang digunakan dalam model adalah aturan (*rule of the game*) dan organisasi (*players*). Kajian ini didasarkan pada proses *systematic review* peraturan perundangan, pernyataan tokoh atau keberadaan institusi, dan laporan *best practice* implementasi perekonomian hijau di berbagai perusahaan/negara.

EKONOMI HIJAU

Secara sederhana, ekonomi hijau dapat dinyatakan model ekonomi yang didasarkan pada prinsip rendah karbon (*low carbon*), efisiensi sumberdaya (*resource efficient*), dan inklusif secara sosial (*socially inclusive*) (UNEP, 2011a). Fauzi (2012) menyatakan ekonomi hijau memandang ekonomi dan lingkungan hidup bukan dua hal yang diametrikal, sebaliknya berusaha menjembatani keduanya untuk menemukan “*the right kind of growth*” yakni selain memenuhi pertumbuhan ekonomi juga mampu memelihara lingkungan bahkan menciptakan pertumbuhan ekonomi baru dari sumber daya alam dan lingkungan tanpa merusaknya. Cato (2009) menyatakan ekonomi hijau mulai dengan orang dan kebutuhannya, alih-alih teori atau konstruksi matematis dari realita.

UNEP (2011b) menyatakan bahwa ekonomi hijau tidak dihadirkan untuk menggantikan konsep pembangunan berkelanjutan, melainkan cara untuk merealisasikannya pada tingkatan nasional, regional, dan global. Ekonomi hijau berkehendak agar 2% PDB global dialokasikan untuk implementasi menghijaukan 10 sektor ekonomi agar tercapai kondisi *low-carbon* dan efisiensi penggunaan sumber daya (*resource-efficient path*). Kata kunci transisi menuju ekonomi hijau adalah memungkinkan terjadinya pertumbuhan ekonomi dan investasi disisi lain terjadi peningkatan kualitas lingkungan hidup dan peningkatan inklusif sosial.

Tidak terlalu banyak – jika tidak bisa dikatakan sulit – untuk mendapatkan artikel penelitian yang dalam judulnya mengandung kata “*green economy*”. Penelusuran dengan menggunakan situs berbayar Pro-Quest hanya mendapatkan 3 artikel ilmiah, jika digunakan kata kunci penelusuran “*green economy*”, yakni artikel Magnani (2012), Chen *et.al.* (2011), dan Kahn (2009). Penelusuran situs publikasi ilmiah Indonesia, yakni ISJD (*Indonesian Scientific Journal Database*) yang dikelola LIPI dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menggunakan kata kunci “ekonomi hijau” dan “*green economy*” pada pilihan judul dan/atau keyword tidak menemukan satu pun artikel. Hasil yang sama ditunjukkan pada saat pencarian menggunakan portal Garuda (Garba Rujukan Digital) yang dikelola Direktorat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (P3M) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Pencarian dengan situs tidak berbayar, misalnya Google, Yahoo, dan sebagainya mendapatkan beberapa makalah dan laporan penelitian yang relevan, antara lain Soedomo (2010) dan LPM Equator (2010).

Publikasi tentang ekonomi hijau yang relatif lengkap diterbitkan di Indonesia diterbitkan oleh Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB (FEM IPB) tahun 2011 dalam rangka dies natalis. Buku tersebut disebut *orange book* 3 dengan judul “*Green Economy, Menuju Pembangunan Berkelanjutan*” berisi kumpulan tulisan dosen dan mahasiswa FEM IPB. Tema tulisan beragam mengikuti latar belakang departemen penulisnya, yakni ilmu ekonomi, ekonomi sumberdaya dan lingkungan, ilmu manajemen, dan agribisnis. Tidak seluruh tulisan berkaitan langsung dengan ekonomi hijau, beberapa yang relevan dalam pengertian isi dan/atau judul adalah Hidayat (2011), Hubeis (2011), Putri *et.al.* (2011), Anggraeni dan Amaliah (2011), Siregar dan Hasanah (2011), Sarianti *et.al.* (2011), Firdaus dan Suryaningsih (2011), dan Suwarli dan Putri (2011).

DATA PENELITIAN

Peraturan Perundangan dan Organisasi dan/atau Personal

Peraturan perundangan yang secara eksplisit dan/atau implisit berkenaan dengan ekonomi hijau dipaparkan pada Tabel 1, sedangkan tokoh dan/atau organisasi yang mendorong implementasi ekonomi hijau dipaparkan pada Tabel 2.



Tabel 1
Variabel Rule of the Game: Peraturan Perundangan Terkait Implementasi Ekonomi Hijau

Rule of the Game	Isi/Narasi
19 Pasal 33 ayat 4 UUD 1945	6 Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
Poin (b) pertimbangan UU 32/2009	Pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh 18 Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
Pasal 14 UU 32/2009	9 Instrumen ekonomi lingkungan hidup merupakan salah satu instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
Paragraf 8 terdiri dari pasal 42 dan 43 UU 32/2009	Rincian tentang instrumen ekonomi lingkungan hidup.
Pepres 61/2011	17 Rencana Aksi Nasional penurunan gas rumah kaca (GRK). Pada tahun 2020 pemerintah 11 Indonesia membuat komitmen untuk menurunkan GRK 26% dengan usaha sendiri, dan mencapai 41% jika mendapatkan bantuan internasional. Peraturan presiden ini seringkali disebut sebagai perpres tentang ekonomi hijau.
7 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup 14/2012	Panduan Valuasi Ekonomi Ekosistem Gambut
7 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup 15/2012	Panduan Valuasi Ekonomi Ekosistem Hutan



Tabel 2

Variabel Player: Organisasi dan/atau Personal yang Mendorong Implementasi Ekonomi Hijau

Variabel Player	Narasi
16 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono	<p>Presiden SBY mencanangkan ekonomi hijau dalam berbagai pertemuan, antara lain:</p> <p>(1) Pidato di Istana Negara 5/6/2012 dalam rangka hari lingkungan hidup. Presiden SBY menyatakan: "Prinsip ekonomi hijau tentu kita terapkan sesuai dengan karakteristik, kondisi, dan kebutuhan bangsa dan rakyat kita. Prinsip ekonomi hijau, insya Allah, juga kita gulirkan pada proses penetapan berbagai bentuk kebijakan, perencanaan dan program, di berbagai sektor pembangunan ekonomi</p> <p>(2) Penerapan kebijakan ekonomi hijau sebagai wujud pembangunan berkelanjutan disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam pidatonya pada diskusi panel di sela-sela Konferensi PBB untuk Pembangunan berkelanjutan atau Rio+20 di Riocentro, Rio de Janeiro, Brazil, Kamis (21/6/2012). Presiden SBY menyatakan: "Kita harus bergerak dari ekonomi keserakahan menuju ekonomi hijau. Ini adalah sesuatu yang perlu dikembangkan di rumah kita, di sekolah kita, dan di tempat kerja kita. Jika warga dunia berjanji untuk mengubah gaya hidupnya, maka keberlanjutan tidak akan lagi menjadi visi tetapi kenyataan</p>
Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan	<p>Industri Kehutanan: Terapkan Praktik Ekonomi Hijau</p> <p>Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan meminta pelaku industri kehutanan menerapkan praktik ekonomi hijau guna mendukung keberlanjutan sumber daya hutan. "Bisnis yang merusak lingkungan memang menghasilkan keuntungan. Tapi jangka pendek. Jadi penting untuk melakukan praktik ramah lingkungan agar usaha yang dijalankan sustain," tegas Zulkifli usai meluncurkan pameran World Forest and Resources Show di Jakarta, Kamis (9/8/2012).</p>
Kementerian Lingkungan Hidup	Memiliki Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan Berkelanjutan
Satgas REDD*	Menetapkan ekonomi hijau sebagai salah satu perhatian.

Best Practice Implementasi Ekonomi Hijau

Model atau implementasi ekonomi hijau telah dilakukan di banyak Negara, baik negara-negara maju ataupun negara-negara sedang berkembang. Situs UNEP banyak memberikan contoh bagaimana ekonomi hijau mulai diterapkan di banyak negara, terutama di negara-negara Afrika. Berikut adalah paparan Bappenas (2011) tentang pengalaman implementasi ekonomi hijau di beberapa negara.

- (1) RRC. Pemerintah Cina mulai mengimplemantasikan konsep ekonomi hijau pada akhir tahun 2005 melalui pengembangan energi terbarukan. Variabel rule of the game pada kasus ini adalah dikeluarkannya undang-undang energi terbarukan, penawaran insentif keuangan energi bersumber tenaga angin dan matahari, pengurangan pajak, Hasil kebijakan, Cina berhasil mengembangkan industri energy terbarukan senilai 17 milyar dolar AS, membuka kesempatan kerja buat 1,5 juta orang di industri energi tenaga biomasa dan tenaga angin.
- (2) Kenya. Prinsip ekonomi hijau diterapkan pada sektor energi terbarukan. Tahun 2008 Pemerintah Kenya mengembangkan fed-in tariff yang mengharuskan perusahaan energi yang menyediakan energi dengan sistem grid, membeli sumberdaya listrik dari produsen energi terbarukan pada harga yang ditetapkan. Dengan cara ini, maka produsen listrik akan mendapatkan harga yang pasti dan penyedia untuk produsen energi terbarukan juga mendapatkan harga pasti dan dapat menutupi biaya produksinya.
- (3) Brasil. Kota Curitiba, salah satu ibukota negara bagian di Brasil, memulai ekonomi hijau dari pengelolaan tata kota dan sistem transportasi perkotaan.



- (4) India. Ekonomi hijau dimulai dengan investasi infrastruktur perdesaan berbasis ekologi. Infrastruktur yang dimaksud dibangun untuk kepentingan mengatasi masalah kekeringan dan erosi yang pada akhirnya berdampak pada konservasi ekosistem.
- (5) Korea Selatan. Ekonomi hijau dimulai dengan mencanangkan visi nasional *low carbon, green growth*. Implementasinya dilakukan dengan mengalokasikan 2 persen GDP setiap tahun untuk mendukung *green growth*.
- (6) Indonesia. Kegiatan yang berkaitan dengan implementasi ekonomi hijau antara lain: metode penanaman hemat air, pengelolaan limbah ternak untuk biogas dan pupuk organik, pemanfaatan limbah perkebunan untuk pupuk organik, serta pemanfaatan minyak sawit untuk biosolar. Untuk bidang energi terbarukan antara lain: pengembangan mikro-hidro skala masyarakat, penggunaan listrik tenaga surya untuk rumah tangga maupun lampu jalan di berbagai daerah, dan penggunaan bahan bakar gas untuk keragaman umum. Langkah secara terpadu, mulai dilakukan dengan diluncurkannya Komitmen Presiden untuk menurunkan emisi GRK sebesar 26% pada tahun 2020, dari *business as usual* saat ini. Komitmen tersebut kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Aksi Penurunan Emisi GRK yang sudah diterbitkan pada bulan September tahun 2011. Rencana Aksi ini sedang disosialisasikan ke daerah-daerah untuk mendorong tersusunnya Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi GRK. Diharapkan akhir tahun 2012 RAD GRK akan selesai, dan sehingga kerangka pelaksanaan penurunan emisi GRK dari pusat sampai ke daerah sudah akan tersedia. Dengan adanya RAD GRK ini, maka kegiatan-kegiatan yang sudah dimulai di berbagai sektor tersebut di atas, akan dapat dilakukan secara lebih terstruktur dan terpadu dalam rangka membentuk kegiatan rendah emisi (karbon).

Selain paparan diatas, kompilasi kebijakan, program, dan inisiatif ekonomi hijau dari seluruh dunia yang dipaparkan World Resource Institute (2011), antara lain: (1) Water Efficient Maize for Africa (WEMA) di Afrika; (2) revitalisasi Loess Plateau di Cina; (3) revival Koperasi Perkebunan Kopi di Etiopia; (4) Agricultural Carbon Finance di Cina; (5) pengembangan masyarakat adat di kampung Ngata Toro yang berada di dalam Taman Nasional Lore Lindu Provinsi Sulawesi Tengah; (6) The N'hambita Community Carbon Project di Mozambique; (7) Farmer-Managed Natural Regeneration (FMNR) di Nigeria; (8) penetapan standar dan kebijakan pertanian organik di Uganda; (9) penetapan feed-in tariffs di Afrika; (10) penetapan undang-undang energi terbarukan di Jerman, dan sebagainya.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Best practice yang ditunjukkan diatas sebagian besar menunjukkan bahwa lokus pelaksanaan ekonomi hijau adalah masyarakat miskin, kawasan perdesaan, sektor pertanian atau sektor primer yang berkenaan dengan sumberdaya alam. Situasi ini sepertinya sejalan dengan 10 sektor yang menjadi perhatian ekonomi hijau yang diinisiasi UNEP.

Bentuk kegiatan ekonomi hijau sebagian besar tidak merupakan modifikasi kegiatan ekonomi konvensional yang selama ini dituntut rakus dan menghabiskan sumber daya alam. Kegiatan ekonomi hijau sepertinya punya jalan sendiri dan peta jalan memulai semuanya dari awal. Pada situasi seperti ini, ekonomi hijau tampil sebagai mazhab baru bukan merupakan koreksi terhadap ekonomi neoklasik. Ekonomi hijau lebih dekat kepada kegiatan pemberdayaan masyarakat, atau pembangunan usaha menengah, kecil dan mikro.

Jika pengamatan tersebut benar, maka masa depan ekonomi hijau akan terbatas. Dari sudut pandang aliran pemikiran ekonomi, seharusnya ekonomi hijau masuk dan menyatu dengan arus pemikiran neoklasik, mewarnai pemikiran tersebut dengan konsep rendah karbon dan social inclusiveness. Dari sudut pandang praksis, ekonomi hijau seharusnya diinisiasi kepada para pengusaha besar, konglomerat, perusahaan multi nasional. Ekonomi hijau seharusnya ditautkan kepada inovasi teknologi bersih dan hijau dengan tetap bisa menerapkan strategi *cost leadership*. Ekonomi hijau sebaiknya lebih banyak memberi perhatian pada industri manufaktur dan masyarakat yang bermukim di kawasan perkotaan.

Sejak kelahirannya implementasi ekonomi hijau harus dinilai dan dipertandingkan dengan ukuran-ukuran yang digunakan untuk menilai efisiensi dan efektivitas perusahaan-perusahaan yang masuk kategori "ekonomi coklat (*brown economy*)". Jika konsep ini tidak diterapkan, maka ekonomi hijau akan merupakan ekonomi subsidi, pada situasi seperti ini misalnya kebijakan feed-in tariffs akan menjadi beban subsidi dalam jangka waktu yang lama atau selamanya.



2

Di Indonesia, isu ekonomi hijau tampaknya dominan berada pada lingkup Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Tinjauan dari variabel player, KLH telah memiliki staf ahli terkait ekonomi hijau, tetapi belum memiliki deputi bidang ini. Pada prakteknya, staf ahli tidak dalam posisi merencanakan dan mengimplementasikan program, fungsi manajerial ini ada pada jabatan deputi. Jika pada posisi deputi atau kelembagaan dibawah deputi ekonomi hijau tidak mendapat tempat tersendiri, maka eksekusi program ekonomi hijau relatif lebih sulit.

Kelembagaan ekonomi hijau sebaiknya dimulai dari sektor swasta. Jika inisiatif ekonomi hijau berasal dari swasta, keyakinan tentang efisiensi dan efektivitas konsep ini lebih teruji. Pada situasi berfikir seperti itu, seharusnya kelembagaan ekonomi hijau ada di Kementerian perekonomian, Kementerian keuangan, Kementerian industri, Kementerian perdagangan, KADIN, sektor perbankan, dan sebagainya, yang pada dasarnya terkait langsung dengan sektor bisnis konvensional (*brown business*).

Dari sisi personal atau aktor, di Indonesia konsep ekonomi hijau telah diinisiasi oleh eksekutif puncak pemerintah, presiden dan menteri. Presiden Indonesia bahkan mencanangkan secara kongkrit besaran yang menunjukkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan penurunan emisi gas rumah kaca. Pertanyaannya, apakah ini cukup? Apakah industri dan dunia usaha juga memiliki visi yang sama. Pada dasarnya industri dan dunia usaha akan lebih mengikuti insentif moneter dibandingkan komitmen pemerintah. Kita semua tahu bahwa peran sektor swasta dalam perekonomian lebih besar dibandingkan peran sektor pemerintah/sektor publik jika ditinjau dari besaran moneter.

Pernyataan personal atau aktor yang berasal dari dunia bisnis dan industri sepertinya dibutuhkan. Hal ini dibutuhkan setidaknya untuk menyempurnakan keseimbangan dari sektor swasta. Pernyataan dari sektor swasta merupakan suara efisiensi dan efektivitas, sedangkan pernyataan personal dari sektor swasta sebagian besar berujung pada regulasi.

Regulasi berkaitan dengan pelaksanaan ekonomi hijau sudah muncul. Efektivitas implementasinya akan sangat tergantung pada pertimbangan finansial, atau lebih tepatnya mekanisme pasar. Meskipun diterbitkan banyak regulasi, jika efisiensi finansial dan prinsip mekanisme pasar tidak berjalan akan sulit sekali. Fakta sejarah menunjukkan, pada sistem ekonomi apapun, pasar selalu bekerja baik secara legal ataupun illegal (*black market* dan sebagainya).

Pada situasi seperti ini, peran kelembagaan untuk sangat dibutuhkan. Ekonomi konvensional yang diberi label "rakus" tidak akan "bertobat" dengan regulasi apalagi himbuan presiden sekalipun. Pendekatan kelembagaan atau struktural secara menyeluruh harus mulai diterapkan. Ekonomi hijau harus masuk dan menyatu pada kelembagaan ekonomi neoklasik atau mekanisme pasar. Dengan demikian model yang harus dibangun adalah menjadikan ekonomi hijau bagian (*embedded*) dari sistem ekonomi konvensional yang didominasi aliran pemikiran neoklasik dan mekanisme pasar.

DAFTAR RUJUKAN

- Anggraeni, Lukytawati dan Syarifah Amaliah. 2011. *Opportunity Cost Emisi Gas Rumah Kaca pada Lahan Gambut: Kasus Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Tulisan dalam Green Economy, Menuju Pembangunan Berkelanjutan*, editor Akhmad Fauzi et.al. Orange Book 3 Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB. IPB Press. Bogor.
- Bappenas. 2011. *Langkah Menuju Ekonomi Hijau: Sintesa dan Memulainya. Laporan Kegiatan Koordinasi Deputi Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup*, Bappenas. Jakarta.
- Cato, Molly Scott. 2009. *Green Economics: An Introduction to Theory, Policy and Practice*. Earthscan. UK and USA.
- Chen, Yungkun, Chia-Yon Chen, dan Tsuifang Hsieh. 2011. *Exploration of Sustainable Development by Applying Green Economy Indicators*. Environ Monit Assess, 182:279-289.
- Fauzi, Akhmad. 2012. *Ekonomi Hijau untuk Bumi*. Artikel Opini Harian Kompas 7 Juli 2012.
- Firdaus, Muhammad dan Tri Suryaningsih. 2011. *Kemiskinan dan Tingginya Konsumsi Rokok: Faktor Penyebab Sulitnya Implementasi Green Economic di Pulau Jawa*. Tulisan dalam Green



Economy, Menuju Pembangunan Berkelanjutan, editor Akhmad Fauzi et.al. Orange Book 3 Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB. IPB Press. Bogor.

Hidayat, Aceng. 2011. **Memahami Green Economy Secara Kritis. Tulisan dalam Green Economy, Menuju Pembangunan Berkelanjutan**, editor Akhmad Fauzi et.al. Orange Book 3 Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB. IPB Press. Bogor.

Hubeis, Musa. 2011. **Prospek Green Tourism Sebagai Kegiatan Ramah Lingkungan**. Tulisan dalam Green Economy, Menuju Pembangunan Berkelanjutan, editor Akhmad Fauzi et.al. Orange Book 3 Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB. IPB Press. Bogor.

Jaya, Wihana Kirana. 2012. **Business Perceptions at the Regional Level in Indonesia Since 1999 to Present. Materi presentasi Konggres ISEI (Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia)**. Yogyakarta.

Kahn, Matthew E. 2009. **The Green Economy**. Foreign Policy 172: 34-116.

LPM Equator. 2011. **Makalah Tahap Awal Strategi dan Desain untuk Strategi Ekonomi Hijau yang Terpilih**. Laporan G. Environmental Support Program (ESP) Danida.

Magnani, Natalia. 2012. **Exploring the Local Sustainability of a Green Economy in Alpine Communities: A Case Study of a Conflict Over a Biogas Plant**. Mountain Research Development 2(32): 109-116.

Putri, Eka Intan Kumala, Rizal Bachtiar, Asti Istiqomah, dan Lidya R. Shaffitri. 2011. **Internalisasi External Cost: Solusi Atasi Pencemaran Lingkungan (Studi Kasus pada Limbah Industri Tahu dan Sampah)**. Tulisan dalam Green Economy, Menuju Pembangunan Berkelanjutan, editor Akhmad Fauzi et.al. Orange Book 3 Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB. IPB Press. Bogor.

Sarianti, T., T. Novianti dan Sumedi. 2011. **Analisis Usaha Tani dan Pemasaran terhadap Padi Ramah Lingkungan Metode SRI**. Tulisan dalam Green Economy, Menuju Pembangunan Berkelanjutan, editor Akhmad Fauzi et.al. Orange Book 3 Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB. IPB Press. Bogor.

Siregar, Hermanto. 2011. **Strategi dan Implikasi Kebijakan untuk Pemantapan Swasembada Beras Berkelanjutan Menghadapi Variabilitas dan Perubahan Iklim**. Tulisan dalam Green Economy, Menuju Pembangunan Berkelanjutan, editor Akhmad Fauzi et.al. Orange Book 3 Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB. IPB Press. Bogor.

Soedomo, Sudarsono. 2010. **Ekonomi Hijau: Pendekatan Sosial, Kultural, dan Teknologi**. Makalah disampaikan pada diskusi "Konsep Ekonomi Hijau/Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan Untuk Indonesia tanggal 14 Juli 2010. BAPPENAS. Jakarta.

Suwarli dan Eka Intan Kumala Putri. 2011. **Green Budgeting Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan (Studi Kasus Wilayah Hinterland Kota Bekasi)**. Tulisan dalam Green Economy, Menuju Pembangunan Berkelanjutan, editor Akhmad Fauzi et.al. Orange Book 3 Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB. IPB Press. Bogor.

UNEP. 2011a. **Why a Green Economy Matters for the Least Developed Countries. A joint publication of United Nations Environment Programme (UNEP), United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), and Office of the High Representative for the Least Developed Countries, Landlocked Developing Countries and Small Island Developing States (UN-OHRLS) for the LDC-IV Conference in May 2011.**

UNEP. 2011b. **Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication**. United Nations Environment Programme.



Pendekatan Kelembagaan

ORIGINALITY REPORT

14%

SIMILARITY INDEX

14%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	ejournal.ukrida.ac.id Internet Source	2%
2	bappeda.babelprov.go.id Internet Source	2%
3	wanaswara.com Internet Source	2%
4	www.coursehero.com Internet Source	2%
5	repository.ub.ac.id Internet Source	1%
6	jdih.kemendag.go.id Internet Source	1%
7	idoc.pub Internet Source	1%
8	Submitted to iGroup Student Paper	<1%
9	lpplmataram.wordpress.com Internet Source	<1%

10	tokokursipijat.blogspot.com Internet Source	<1 %
11	pt.scribd.com Internet Source	<1 %
12	tr.scribd.com Internet Source	<1 %
13	etd.repository.ugm.ac.id Internet Source	<1 %
14	id.123dok.com Internet Source	<1 %
15	vdocuments.site Internet Source	<1 %
16	www.woohoosg.com Internet Source	<1 %
17	Dwisatrio B., Said Z., Permatasari A.P., Maharani C., Moeliono M., Wijaya A., Lestari A.A., Yuwono J., Pham T.T.. "The context of REDD+ in Indonesia: Drivers, agents and institutions [Update edition]", Center for International Forestry Research (CIFOR) and World Agroforestry Centre (ICRAF), 2021 Publication	<1 %
18	pengata.wordpress.com Internet Source	<1 %
19	senusantara.wordpress.com	

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On